



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKHSAN
2. Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 179456

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 8.365.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/255 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.656.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.917.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.917.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/540 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.875.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 418.454.545

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPR 2 5D EXC 4X2 AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 305.454.545
2. MOBIL, MERCEDES BENZ E320MT Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 3V IE A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.517.893.016

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 12.301.847.561

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.301.847.561



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.